



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 115/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1.2.1/IX/2025

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, diperlukan dukungan segenap Jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk membangun Zona Integritas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SEK/ SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 75A/KMA/SK/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

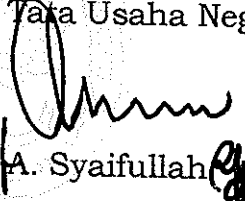
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/KPTTUN.W5.TUN/SK.PW1.2.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KEDUA...

- KEDUA : Membentuk dan Menetapkan kembali Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Pencanaan dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah :
- a. Memberikan dukungan pada masing-masing Seksi untuk mewujudkan terlaksananya Pencanaan dan Komitmen bersama Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pencanaan dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas pada seksi masing-masing dengan sebaik-baiknya;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 115/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1.2.1/IX/2025

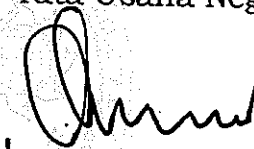
Tanggal : 24 September 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT TUN Palembang
2.	Ketua Tim	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT TUN Palembang
3.	Koordinator Teknikal	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera PT TUN Palembang
4.	Koordinator Operasional	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris PT TUN Palembang
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Koordinator	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
		Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
		Isnaini, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
		Aprilia Berlianda, S.M.	Penata Layanan Operasional
		M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti
		Tivri Manthiq Sibarani, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
		Risky Usnarto, S.H.	PPNPN
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)			
1.	Koordinator	Irhamto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara
		Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan
		Medi Darmawansyah, S.H., M.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
		Rina Zaleha, S.H.	Panitera Pengganti
		Linopa Angra Oktasona, A.Md.	Juru Sita Pengganti
		Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil
		Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B.	Pranata Keuangan APBN Terampil
		M. Syaribi Andriansyah, Amd.Kom	PPNPN

KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III)			
1.	Koordinator	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi
		Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional
		Firdaus Amin, S.E., M.M.	Penata Layanan Operasional
		Akbar Winda Nata, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
		Ichwan Al Faridsi, S.Pd	PPNPN
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV)			
1.	Koordinator	Herman Baeha, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
		Ade Kurniawan, A.Md.	Juru Sita Pengganti
		Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi
		Basuki	(PPPK) Operator Layanan Operasional
		Gabriela Ramadanti, S.H.	PPNPN
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)			
1.	Koordinator	Husein Amin Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum
		Hj. Deo Yuvanti, S.H.	Panitera Pengganti
		Sulami, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
		Sri Wulan Luciyanti, S.H.	Panitera Pengganti
		Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	Juru Sita Pengganti
		Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		R.M. Iqbal Tawakal, Amd.	PPNPN
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)			
1.	Koordinator	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
2.	Anggota	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
		Darul Kutni, S.H.	Panitera Pengganti
		Maryani Ub, S.H.	Panitera Pengganti
		Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Risa Setiawati, S.I.Kom.	Penata Keprotokolan
		Tunky Ramadhan	(PPPK) Operator Layanan Operasional
		Nova Yuliana	PPNPN

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *et al.*